

Dinamika Ekonomi Politik dalam Regulasi BBM: Studi Kasus Pengoplosan Pertamina di Indonesia

Aisyah Aulia, Melati, Nurilawati, Mellyana Candra

¹²³Ilmu Administrasi Negara Universitas Maritim Raja Ali Haji

ARTICLE INFO

Article history:

Received April 30, 2025

Revised May 23, 2025

Accepted May 28, 2025

Available online June 02, 2025

Kata Kunci:

Political economy, fuel regulations, pertamax adulteration, economic interests, political interests.

Keywords:

Data quality, consumer purchasing decisions, consumer behavior.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Regulasi bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia berada dalam persimpangan antara kepentingan ekonomi dan politik, di mana pemerintah sebagai regulator utama harus menyeimbangkan berbagai faktor eksternal seperti tekanan dari perusahaan energi, dinamika politik, serta respons masyarakat. Kompleksitas kebijakan ini sering kali menciptakan celah yang dimanfaatkan oleh pihak tertentu, seperti dalam kasus pengoplosan Pertamina yang mencerminkan ketidaksempurnaan regulasi serta persaingan kepentingan antara pemerintah, perusahaan energi, dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana regulasi BBM di Indonesia dibentuk dalam konteks ekonomi politik serta dampaknya terhadap praktik ilegal seperti pengoplosan BBM. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur, penelitian ini mengkaji kebijakan yang telah diterapkan, tantangan yang dihadapi, serta ketidakseimbangan dalam implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi BBM sering kali mengalami ketidakstabilan akibat intervensi politik dan dinamika ekonomi yang kompleks, di mana ketidakjelasan kebijakan, lemahnya pengawasan, serta kepentingan berbagai pihak menyebabkan regulasi tidak selalu

efektif dalam menekan praktik ilegal. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih transparan, konsisten, serta mekanisme pengawasan yang ketat agar regulasi BBM dapat berjalan secara efektif dan adil bagi seluruh pemangku kepentingan.

ABSTRACT

The regulation of fuel oil (BBM) in Indonesia is at the intersection of economic and political interests, where the government as the main regulator must balance various external factors such as pressure from energy companies, political dynamics, and public response. This policy complexity often creates loopholes that are exploited by certain parties, such as in the case of Pertamina bootlegging which reflects regulatory imperfections as well as competing interests between the government, energy companies, and the public. This study aims to analyze how fuel regulations in Indonesia are formed in the context of political economy and their impact on illegal practices such as fuel copying. Using a qualitative approach based on a literature study, this research examines the policies that have been implemented, the challenges faced, and the imbalances in their implementation. The results show that fuel regulations often experience instability due to political intervention and complex economic dynamics, where policy vagueness, weak supervision, and the interests of various parties cause regulations to not always be effective in suppressing illegal practices. Therefore, more transparent, consistent policies and strict monitoring mechanisms are needed so that fuel regulations can run effectively and fairly for all stakeholders.

PENDAHULUAN

Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan komoditas strategis yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia (Tambunan et al., 2022). Dengan jumlah penduduk yang besar dan tingkat mobilitas yang tinggi, permintaan terhadap BBM terus meningkat setiap tahunnya. Untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan BBM bagi masyarakat, pemerintah menerapkan berbagai kebijakan, termasuk subsidi dan pengaturan harga. Namun dalam praktiknya, kebijakan ini menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah perbedaan harga antara BBM bersubsidi dan non-subsidi yang sering kali mendorong munculnya praktik pengoplosan BBM. Fenomena pengoplosan BBM, khususnya Pertamina, menjadi bukti adanya celah dalam sistem regulasi energi di Indonesia. Biasanya praktik ini terjadi ketika BBM bersubsidi, seperti

*Corresponding author

E-mail addresses: Aisyahlia2525@gmail.com, melatisjk@gmail.com, nurilawatidinda@gmail.com, mellyana1001@gmail.com

Pertalite, dicampur dengan BBM non-subsidi untuk memperoleh keuntungan dari selisih harga. Salah satu tindakan penyalahgunaan BBM adalah pengoplosan atau pemalsuan BBM (fuel adulteration) yang didefinisikan sebagai tindakan pencampuran BBM komersial dengan bahan-bahan tertentu untuk meningkatkan volume BBM komersial tersebut agar mendapat keuntungan besar (Jusuf Leiwakabessy et al., 2023). Hal ini, menunjukkan bahwa kebijakan energi di Indonesia tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memiliki konsekuensi sosial dan politik yang lebih luas.

Dalam perspektif ekonomi politik, kebijakan BBM tidak hanya dilihat sebagai persoalan teknis dalam mengatur distribusi dan harga, tetapi juga merupakan hasil interaksi berbagai kepentingan antara pemerintah, perusahaan energi, dan masyarakat. Pemerintah sering kali dihadapkan pada dilema antara mempertahankan stabilitas ekonomi dengan memberikan subsidi BBM dan mendorong mekanisme pasar yang lebih kompetitif. Di sisi lain, perusahaan migas memiliki kepentingan dalam regulasi yang mendukung keuntungan bisnis mereka, sedangkan masyarakat menginginkan harga BBM yang tetap terjangkau. Selain itu, kebijakan BBM juga sering dijadikan sebagai alat politik. Keputusan soal harga BBM dapat memengaruhi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah, terutama menjelang pemilihan umum. Sebaliknya, tekanan dari lembaga internasional dan pelaku usaha swasta mendorong liberalisasi sektor energi. Dalam konteks ini, regulasi BBM menjadi arena tarik-menarik kepentingan ekonomi dan politik yang rumit.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika ekonomi politik dalam regulasi BBM di Indonesia, khususnya dalam konteks pengoplosan Pertamina. Studi ini akan menelusuri bagaimana kebijakan energi dibentuk oleh berbagai kepentingan ekonomi dan politik serta bagaimana regulasi yang ada dapat membuka peluang bagi praktik ilegal seperti pengoplosan BBM. Dengan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih mendalam mengenai tantangan dan implikasi kebijakan energi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan kerangka analisis ekonomi politik dan kebijakan/regulasi untuk memahami fenomena pengoplosan Pertamina di Indonesia. Data dikumpulkan melalui kajian pustaka atas literatur akademik, dokumen kebijakan pemerintah (termasuk peraturan harga dan regulasi distribusi BBM), serta laporan investigative dan media yang memuat temuan penyelidikan Kejaksaan Agung. Selain itu, data sekunder harga BBM (Pertalite dan Pertamina) periode 2021-2024 digunakan untuk mengukur disparitas harga dan mengidentifikasi insentif ekonomi bagi pelaku. Analisis dilakukan secara tematik dengan menelaah: 1. Struktur relasi kekuasaan dan kepentingan pihak pemerintah, BUMN, kontraktor swasta, dan oligarki politik yang membentuk kebijakan energi. 2. Kerangka regulasi serta mekanisme pengawasan distribusi BBM yang menciptakan celah bagi praktik pengoplosan. Melalui kombinasi analisis konten terhadap kebijakan/regulasi dan interpretasi ekonomi politik atas data harga dan laporan kasus, penelitian ini bertujuan memetakan politik, dan efektivitas regulasi dalam menimbulkan atau menekan praktik ilegal pengoplosan BBM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengoplosan BBM sebagai Gejala Struktural

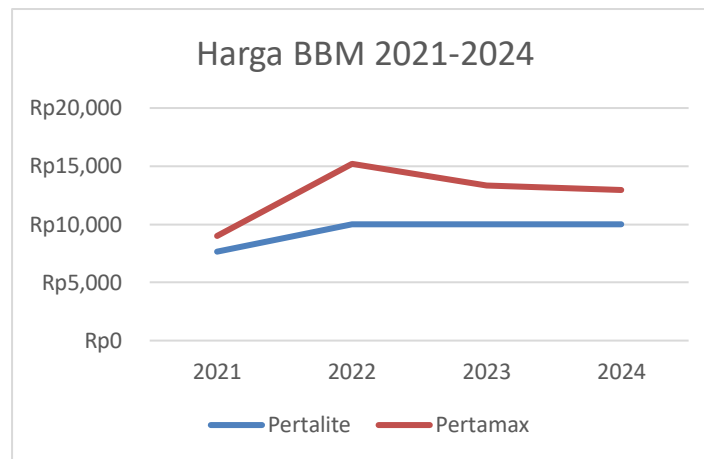
Dalam kasus pengoplosan BBM yang disampaikan oleh Kejaksaan Agung pada awal tahun 2025 menyampaikan adanya persoalan yang lebih besar dalam pengelolaan energi di Indonesia. Ditemukan praktik pengoplosan yang dilakukan oleh oknum-oknum di anak perusahaan BUMN dan kontraktor swasta, bukanlah tindakan yang terjadi dalam skala kecil, tetapi merupakan praktik yang terjadi secara terorganisir dan sistematis (Sulistiono, 2025). Pengoplosan Pertamina menjadi isu serius karena adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan kontrol kualitas BBM. Praktik blending bahan bakar dengan RON lebih rendah menjadi RON92 dilakukan untuk mengurangi biaya produksi dalam meningkatkan keuntungan (BPKN-RI, 2025). Tindakan ini dilakukan dengan niat untuk memanipulasi kualitas BBM demi meraih keuntungan pribadi dengan menjual BBM oplosan yang lebih murah dengan harga yang lebih tinggi. Melihat kasus pengoplosan BBM negara mengalami kerugian jelas bahwa permasalahan ini bukan hanya sekedar pelanggaran teknis, tetapi mencerminkan isu yang lebih kompleks dan sistematis. Pada dasarnya, ini adalah masalah struktural yang mendalam, yang mencerminkan lemahnya kontrol, pengawasan, dan akuntabilitas dalam sektor energi, serta pengaruh besar dari kepentingan elite yang memperburuk situasi ini.

Mereka yang terlibat dalam pemalsuan bahan bakar Pertamina akan dijerat dengan tuntutan pidana, karena tindakan mereka dianggap sebagai bentuk korupsi yang merugikan keuangan negara. Bahan bakar berkualitas rendah dicampur, lalu dijual dengan harga lebih tinggi untuk memperoleh keuntungan pribadi secara ilegal. Praktik ini dilakukan di luar prosedur resmi dan tanpa pengawasan kualitas yang memadai, sehingga melanggar peraturan distribusi bahan bakar nasional. Berdasarkan hal tersebut, para pelaku harus diadili sesuai dengan pasal-pasal yang berlaku dan sesuai dengan bukti penyalahgunaan wewenang serta keterlibatan dalam tindak pidana bersama. Dalam proses impor minyak

mentah dan produk kilang, Kejangung menemukan adanya mark up kontrak pengiriman oleh Yoki selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. Akibatnya, negara mengeluarkan biaya tambahan sebesar 13 hingga 15 persen secara tidak sah, yang kemudian menguntungkan tersangka MKAR dari transaksi tersebut.(Alwi Rahman Kusnandar, n.d.)

Disparitas Harga BBM dan Insentif Ekonomi

Disparitas harga antara BBM subsidi dan non-subsidi di Indonesia menjadi salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya praktik pengoplosan BBM. Perbedaan harga yang mencolok antara BBM bersubsidi dan non-subsidi menciptakan insentif ekonomi yang kuat bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan praktik ilegal. Dalam grafik perbandingan harga pertalite dan pertamax pada tahun 2020-2024:



Gambar 1. Harga BBM Pertamina Tahun 2021-2024

Sumber 1 : tempo.co "inilah rincian kenaikan harga bbm pertamina 5 tahun terakhir"

Sumber 2 : tempo.co "tahun baru 2024, harga bbm non subsidi turun"

Gambar grafik di atas menunjukkan harga dari tahun 2021 sampai 2024, harga pertalite cenderung stabil dan lebih rendah dibandingkan dengan pertamax, yang harga literannya terus menaik. Pada tahun 2024, harga pertalite tercatat sebesar Rp 10.000 per liter, sedangkan harga pertamax mencapai Rp 12.950 per liter, adapun selisih harga yang semakin besar setiap tahunnya (TEMPO, 2024) (TEMPO, 2022). Karena harga yang melambung tinggi, tidak mengherankan jika ada pihak-pihak yang mencoba untuk membeli BBM yang lebih murah untuk diperjualkan sebagai BBM premium. Dengan adanya selisih harga yang sangat mencolok ini memberikan peluang bagi pelaku untuk mengakses keuntungan yang besar dengan modal yang relatif kecil.

Fenomena ini bukan hanya menciptakan celah untuk penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pengoplosan BBM, tetapi hal ini juga mengganggu mekanisme pasar yang seharusnya adil dan transparan. Praktik ini akan merugikan para konsumen karena produk yang diperolehnya di bawah standar sekaligus merugikan negara karena pendapatannya berasal dari penjualan BBM yang tidak sesuai dengan ketentuan regulasi. Sementara itu, pihak-pihak yang terlibat dalam praktik ilegal ini bisa mengumpulkan keuntungan besar dalam waktu singkat. Kondisi ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan yang signifikan dalam kebijakan harga BBM, yang pada akhirnya membuka peluang terjadinya manipulasi pasar. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan penyesuaian kebijakan harga yang lebih adil serta memperkuat pengawasan guna meminimalkan insentif ekonomi yang merugikan.

Kelemahan pengawasan dan Regulasi

Lemahnya mekanisme pengawasan internal dan eksternal di badan usaha milik negara (BUMN) seperti Pertamina dianggap sebagai salah satu faktor utama pemicu terjadinya praktik korupsi. Hal ini tercermin dari kasus-kasus manipulasi data dan pengaturan tender yang melibatkan oknum internal maupun pengaruh dari pihak eksternal. Seperti yang disampaikan oleh anggota Komisi VII DPR RI, Meitri Citra Wardani, pengawasan yang tidak berjalan optimal membuka ruang terjadinya moral hazard, yaitu kondisi di mana para pejabat atau petinggi perusahaan merasa aman untuk mengambil keputusan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak adanya pengawasan yang efektif (Fajri, 2025).

Permasalahan-permasalahan tersebut mengindikasikan perlunya reformasi tata kelola perusahaan negara secara menyeluruh, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan pemilihan mitra (Hartanto et al., 2025). Rekomendasi yang diusulkan antara lain penguatan sistem pengawasan baik dari internal

perusahaan maupun dari lembaga pengawas eksternal, penerapan sanksi yang tegas bagi para pelanggar, dan peningkatan integritas dalam proses pengambilan keputusan strategis. Reformasi ini sangat penting agar pengelolaan sektor energi oleh BUMN seperti Pertamina dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan mengedepankan kepentingan publik seperti yang diamanatkan oleh konstitusi.

Dominasi Oligarki dalam kebijakan Energi

Kebijakan energi di Indonesia tidak lepas dari pengaruh aktor-aktor kuat yang memiliki kekuasaan ekonomi dan politik (Budi, 2024). Dalam literatur ekonomi politik, keterlibatan elite bisnis dan politik dalam proses perumusan kebijakan sering disebut sebagai bagian dari dinamika oligarki. Dalam konteks ini, pengaruh dari pelaku usaha migas, elite politik, maupun jaringan kekuasaan informal dapat memengaruhi arah kebijakan energi nasional.

Beberapa kajian menunjukkan bahwa di negara berkembang, termasuk Indonesia, kebijakan energi cenderung lebih mengakomodasi kepentingan kelompok terbatas ketimbang kepentingan publik luas. Misalnya, dalam kebijakan penyesuaian subsidi BBM, keputusan yang diambil sering kali lebih mencerminkan preferensi politik dan ekonomi aktor dominan ketimbang pertimbangan kesejahteraan masyarakat.

Meski demikian, penting untuk menekankan bahwa tidak semua bentuk keterlibatan elite bersifat negatif. Namun, ketidakseimbangan pengaruh dan lemahnya akuntabilitas publik dapat menyebabkan ketimpangan dalam implementasi kebijakan, membuka celah praktik penyalahgunaan seperti pengoplosan BBM. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas, serta memastikan bahwa kebijakan energi disusun secara inklusif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

SIMPULAN

Regulasi bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia berada dalam lingkup kompleksitas yang melibatkan kepentingan ekonomi, politik, dan sosial. Studi ini mengungkapkan bahwa praktik pengoplosan BBM bukan sekedar pelanggaran teknis, melainkan mencerminkan permasalahan struktural yang lebih mendalam, seperti lemahnya sistem pengawasan, ketidakseimbangan harga, serta dominasi oligarki dalam perumusan kebijakan energi. Kesenjangan harga antara BBM bersubsidi dan non-subsidi menciptakan insentif ekonomi yang kuat bagi pelaku ilegal, sementara lemahnya pengawasan dan regulasi yang tidak memadai semakin membuka peluang terjadinya manipulasi dalam distribusi dan penggunaan BBM. Oligarki energi memainkan peran dominan dalam pembentukan kebijakan, sehingga kepentingan publik kerap terpinggirkan. Untuk membangun tata kelola energi yang adil, transparan, dan berkelanjutan, pemerintah perlu melakukan reformasi struktural secara menyeluruh. Reformasi ini mencakup penguatan sistem pengawasan, pembaruan regulasi yang relevan dengan perkembangan zaman, serta pembebasan kebijakan energi dari cengkeraman kepentingan elite sempit. Tanpa langkah tegas, praktik ilegal seperti pengoplosan BBM akan terus berulang dan menimbulkan kerugian bagi negara dan rakyat.

Selain itu, keterlibatan aktor-aktor berkepentingan dalam proses kebijakan, baik dari sektor bisnis maupun politik, turut membentuk struktur pengambilan keputusan yang tidak selalu mencerminkan kepentingan publik. Fenomena ini menegaskan pentingnya perbaikan tata kelola sektor energi yang menekankan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan pada masyarakat. Pemerintah perlu melakukan reformasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan mekanisme perumusan kebijakan, agar regulasi BBM benar-benar mampu mencegah praktik ilegal dan memberikan keadilan bagi semua pemangku kepentingan. Tanpa langkah korektif yang tegas, praktik pengoplosan BBM akan terus menjadi ancaman bagi kestabilan energi nasional dan kepercayaan publik terhadap tata kelola negara.

REFERENSI

- Alwi Rahman Kusnandar. (n.d.). Modus korupsi Pertamina: Oplos Peralite jadi Pertamina. *Universitas Muhammadiyah Jakarta*. (2025). https://umj.ac.id/Just_info/Modus-Korupsi-Pertamina-Oplos-Peralite-Jadi-Pertamax/.
- BPKN-RI. (2025). *Kasus Dugaan Pengoplosan Pertamina-Pertalite : Bukan Hanya Kerugian Negara, tapi Juga Kerugian Konsumen!*
- Budi, K. (2024). Oligarki dalam Demokrasi serta Prakteknya dalam Politik Hukum Indonesia. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(4), 1267–1274. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i4.1101>
- Fajri, R. (2025). *Pengawasan yang Lemah Dinilai Pemicu Korupsi di Pertamina*.

- Hartanto, D. V., Navrizal, F., Surya, F., Berlanty, H., & Naufal, M. (2025). *Menegakkan Keadilan dalam Pengelolaan Sumber Daya Negara (Studi Kasus : Korupsi Pengoplosan di Pertamina)*. 16(01), 1–4.
- Jusuf Leiwakabessy, Esterlina E. E. M. Nanlohy, Sherly Lewerissa, & Evan R. Ferdinandus. (2023). Sosialisasi Pencegahan Peredaran BBM Oplosan di Masyarakat. *Pandawa : Pusat Publikasi Hasil Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 28–37. <https://doi.org/10.61132/pandawa.v2i1.385>
- Sulistiono, D. (2025). *PERAN HUKUM DALAM MENGATASI PENYALAHGUNAAN DISTRIBUSI BBM BERSUBSIDI THE*. 4. <https://doi.org/https://doi.org/10.47353/bj.v4i11.527>
- Tambunan, N., Aprilia, S., & Pangesti Rahayu, N. (2022). Study Literature: Dampak Kenaikan Bbm Bagi Perekonomian Rakyat. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(1), 329–336. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i1.550>
- TEMPO. (2022). *Inilah Rincian Kenaikan Harga BBM Pertamina 5 Tahun Terakhir*.
- TEMPO. (2024). *Tahun Baru 2024, Harga BBM Non Subsidi Turun*.